PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN : K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
elp. (0541) 221120, 220212, 220066 ; fax. (0541) 220031; email : dispora_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : http://disporakaltim.info
S A M A R I N D A 75119

NOTA DINAS

Kepada Yth : Pejabat Administrator di lingkungan Dispora Prov. Kaltim
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim
Tanggal : 11 Januari 2022
Nomor : 414 / 44 / Dispora-Umum
Perihal : Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan tertib pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan, maka dimohon kepada saudara dapat mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hal tersebut.

Terkait daftar Peraturan perundang-undangan yang dapat dipedomani sebagai berikut :

A. ORGANISASI

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang No.40 tahun 2010 tentang Kepemudaan
3. Undang undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
5. Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9)
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasaranaolahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

B. ADMINISTRASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012 Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
4. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik;
5. PP No 61 TH 2010 tentang pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

C. PERSONIL/PEGAWAI

1. Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian bagi PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil.
8. Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 tahun 2020 tentang tata Cara Pemberian Pemotongan, Penghentian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 tahun 2021 tentang Rancangan Ketentuan pengisian Daftar hadir bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 1976 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.;

19. Pergub Nomor 82 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim
20. Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
21. Pergub Nomor 4 tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
22. Pergub Nomor 70 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

D. KEUANGAN

1. PMK-83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023
2. PMK-2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
3. PMK-12/PMK.02/2022 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. PMK-24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
5. PMK-199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
6. PMK-123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
7. PMK-118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
8. PMK-113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
9. PMK-60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11); 7. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 56);

Daftar diatas dapat mengalami perubahan, apabila terdapat peraturan perundang-undangan terbaru terkait pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Agus Tianur, M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650814 199803 1 006